

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1998, Pengantar Hukum Pajak. PT Refika Aditama, Bandung. 1978, Ilmu Hukum Pajak cetakan ke VII, PT eresco, Jakarta*
- Eko, J, 1992, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, PT Prima Kampus Grafika, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gaviota, Andrea 2021, *ABC Feminisme, Akar dan Riwayat Feminisme untuk Tatanan Hidup yang Adil*, Bright Publisher, Yogyakarta.
- Gunadi, et al., 1997, *Perpajakan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harjo, Dwikora, 2013, *Perpajakan Indonesia (sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Irianto, Sulistiyowati, 2006, "Perempuan dan Hukum": Menuju Hukum yang Berprektif Kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lahey K, 2018, *Gender, Taxation and Equality in Developing Countries: Issues and Policy Recommendations*, UN Women.
- Marsumi, Laudin, 2006, *Hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Munawir, 1997, *Perpajakan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1980, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Muqodim, 1991, *Perpajakan Buku 1*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet, 2014, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta.
- Saidi, Djafar, 1987, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Makassar.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suandy, Erly, 2009, *Hukum Pajak edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Widyaningsih Arista, 2011, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan pendekatan mind map*, Alfabeta, Bandung.

Artikel Jurnal

Anggarsari, Susi D, “*Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin*”, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, Volume 17, Nomor 2, Mei-Agustus 2010.

Cock, Jacklyn, ‘*What Is Progressive Feminism?’ Questions Raised by the Life of Jane Waterston (1843- 1932)*’, Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Agenda Feminist Media. No. 5 (1989), pp. 1-16

Cremer, Helmuth, at al, “*Income taxation of couples and the tax unit choice*” Volume. 25, No. 2, April 2012.

Juniawaty. Rudeva, “*Wanita Kawin Memilih Terpisah (Mt) Dalam Status Perpajakan Di Indonesia*”, *Jurnal Sosio-E-Kons*, Volume. 9 No. 2 Agustus 2017.

Minollah, “*Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok*”, *Jurnal Ius*, Vol V, No 1, April 2017

Nur, Titin Fachriah, “*Implementasi PER-19/PJ/2014 Terhadap Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan Pajak*”, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2014

Prasetyo, Kuncoro Bayu, *Membaca Diskursus Post-Feminisme Melalui Novel “Perempuan Di Titik Nol”*, *Jurnal Komunitas*, Volume 2, No. 2, 2010.

Turatmiyah, Sri, at al, “*Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015*”, *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, No. 1, 2018.

Hasil penelitian/tugas akhir

Saraswati, Azizah, Prajna, 2017, *Pengenaan PPh pasal 21 Terhadap Uang Manfaat Pensiun Yang Dibayarkan Sekaligus Ditinjau dari Prinsip Keadilan*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pusparani, Annisa, Dyah, 2008, *Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Ditinjau Dari Asas Keadilan Horizontal*, Skripsi, Universitas Indonesia.

Purvitaningrum, Aisyah Fikrianis, 2020, *Kajian Teori Hukum Feminisme Terhadap Pph Perempuan*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Internet

Ayu, I Kade Dewi Utami, “Polemik Wanita Dan Penghasilannya: Ketidaksetaraan Dalam Pajak Penghasilan”, <https://cita.or.id/polemik-wanita-dan-penghasilannya-ketidaksetaraan-dalam-pajak-penghasilan/>, diakses 05, April 2021.

Direktorat Jenderal Perpajakan, “Perhitungan Pajak Wanita Kawin”, <https://pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin>, diakses 15 November 2020

Direktorat Jenderal Perpajakan, “Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wanita Kawin” <https://www.pajak.go.id/id/nomor-pokok-wajib-pajak-bagi-wanita-kawin>, Diakses 22 Desember 2020

OECD, “*Why care about Taxation and Gender Equality*”, <https://www.oecd.org/dac/gender-development/44896295.pdf>, diakses pada 05 Juni 2021.

Prastowo, Yustinus, 2016, Lihatlah, Ibu! Kebijakan Pajak terhadap Perempuan, <https://cita.or.id/tajuk/lihatlah-ibumu/>, diakses pada 25 November 2020

Redaksi DDTCNews, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan, https://news.ddtc.co.id/bukti-pemotongan-pph-pasal-21-bagi-karyawan15808_ diakses 25 November 2020

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Nomor 49 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara No. 59 Tahun 1994 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 34/Pj/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 04/Pj/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Penguatan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Surat Edaran Nomor Se-29/Pj/2010 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri.